

SKRIPSI

TRUST DALAM JARINGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI MAROS



FACHRA YAUMIL ANNISA

E011221098



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

SKRIPSI
***TRUST* DALAM JARINGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN**
PANGAN DI MAROS

FACHRA YAUMIL ANNISA
E011221098



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2025

FACHRA YAUMIL ANNISA
E011221098

Skripsi

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada
tanggal **12 September 2025**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Program Studi Administrasi Publik
Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Makassar

Mengesahkan
Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP.196310151989031006

Mengetahui
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP.196310151989031006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "*Trust* dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Maros" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Alwi, M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 September 2025

Yang menyatakan,



Fachra Yaumil Annisa

E011221098

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan Skripsi ini dapat selesai atas kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa dan atas bimbingan, diskusi, dan arahan Prof. Dr. Alwi, M.Si sebagai pembimbing, Prof. Dr. Gita Susanti, M.Si, sebagai penguji 1, dan Nuralamsyah Ismail, S. Sos., M.A., sebagai Penguji 2. Saya Mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, PPL, Kelompok Wanita Tani Kabupaten Maros yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian ini di lapangan, dan kepada petugas rumah sakit, maupun masyarakat atau pasien atas kesempatan mengambil data untuk memperkaya hasil penelitian saya.

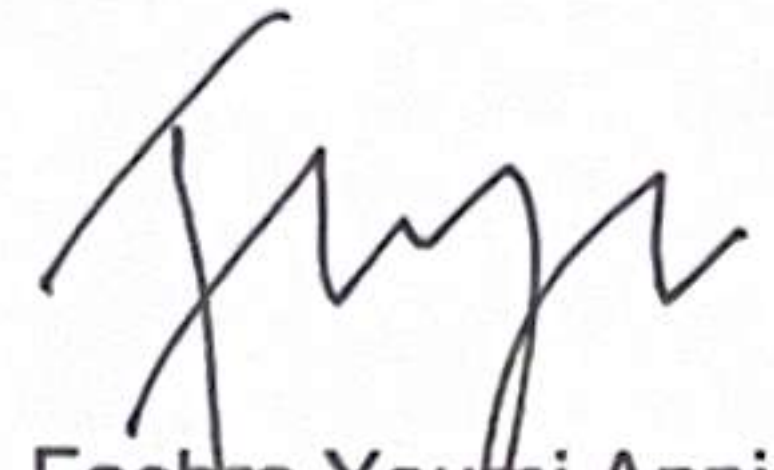
Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan serta Wakil Dekan FISIP Unhas, dan seluruh Dosen serta Staff pada Departemen Ilmu Administrasi tanpa terkecuali yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana dalam penelitian ini.

Kepada kedua orang tua tersayang dan tercinta, Ayah Abdul Latif, S. Sos. dan Ibu Sulastri, S. Pd., M. Pd. dan satu-satunya Kakak saya Muh Fachrul Rijal L dan Keponakan saya Zea serta kakak ipar mila, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan, sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, terima kasih juga kepada kak Salsadila yang telah sama sama menyelesaikan penelitian ini terima kasih juga kepada tante, sepupu dan adikz zalwa yang membantu atau menyemangati penulis selama pengerjaan tugas akhir, terima kasih kepada sahabat OSIS 19 NOWACANAERA 4.0 (Aisya, Wahida, Lisa, Halilah, Aura, Nurma, Mari, Elu, Ammar, Ersten, Ashab, Azwar, Aqbar, Arsan, Dhaffa, Picco) yang selalu menyemangati, mendoakan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi semoga kita semua sukses dunia akhirat, terima kasih kepada teman KKN awet (NAILAH) yang telah menghibur dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk teman-teman pada masa perkuliahan PT VALE (Aricha, Nafilah, Saskia) serta teman saya (ikky dan Tikdew), atas dukungannya selama dunia perkuliahan. Kepada teman-teman Ocean 2022 atas segala cerita dan pengalaman kuliah selama menjadi mahasiswa. Serta saya ucapkan terima kasih kepada seseorang yang cuek membuat saya semangat kerja skripsi Terima kasih. kepada HUMANIS FISIP UNHAS sebagai organisasi kampus yang telah memberikan ilmu dan pengalaman perkuliahan, serta untuk pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut merasakan sukacita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah pengetahuan terkait penelitian ini. Terakhir, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan ataupun kekurangan yang mungkin

terdapat dalam skripsi ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Penulis,



Fachra Yaumi Annisa
E011221098

ABSTRAK

Fachra Yaumil Annisa. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. *Trust* dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Maros, xii + 59 halaman, 11 tabel + 27 daftar Pustaka + Lampiran (Dibimbing Oleh Prof. Dr. Alwi, M.Si.)

Kepercayaan (trust) merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk pada isu ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepercayaan dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros dengan menggunakan kerangka teori dari Sako (1998) dan Rousseau et al. (1998), yang mencakup tiga dimensi utama: goodwill trust, agreement trust, dan absence of opportunistic behavior. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh semangat dan solidaritas anggota KWT (goodwill trust), kepatuhan pada kesepakatan bersama (agreement trust), serta rendahnya penyalahgunaan bantuan (absence of opportunistic behavior). Namun, tantangan muncul pada kelompok yang kurang aktif akibat keterbatasan sumber daya dan lemahnya komitmen anggota. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aktor lokal dan peningkatan manajemen jaringan sebagai upaya memperkuat kolaborasi serta menjamin keberlanjutan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros.

Kata kunci: *Trust*, Jaringan Kebijakan, Ketahanan Pangan, P2L, Kelompok Wanita Tani

ABSTRAK

Fachra Yaumil Annisa. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. *Trust in the Food Security Policy Implementation Network in Maros*, xii + 59 pages, 11 tables + 27 bibliographies + appendices (Supervised by Prof. Dr. Alwi, M.Si.)

Trust is a fundamental element in ensuring the effectiveness of policy implementation networks, particularly in the field of food security. This study aims to analyze the role of trust in the policy implementation network of food security in Maros Regency by applying the trust framework of Sako (1998) and Rousseau et al. (1998), which consists of three main dimensions: *goodwill trust*, *agreement trust*, and *absence of opportunistic behavior*. This research employed a qualitative approach with a case study design, using in-depth interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that the effectiveness of policy implementation is strongly influenced by the enthusiasm and solidarity of farmer group members, adherence to mutual agreements, and the low presence of opportunistic behavior. However, the main challenges lie in weak commitment and limited resources among less active groups, which hinder program sustainability. This study recommends strengthening local actors' capacity and improving network management to enhance collaboration and ensure the sustainable implementation of food security policies in Maros Regency.

Keywords: Trust, Policy Network, Food Security, P2L, Women Farmer Groups

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tinjauan Teori.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II METODE PENELITIAN.....	16
2.1 Pendekatan Penelitian	16
2.2 Desain Penelitian	16
2.3 Prosedur Penelitian.....	16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	20
3.1 <i>Goodwill trust</i>	20
3.2 <i>Ggreement trust</i>	25
3.3 <i>Absecnce of Opportunistic Behavior</i>	29
BAB IV PENUTUP.....	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1. 1. Jumlah Kelompok Wanita Tani di Maros.....	20
Tabel 3.1. 2. Reduksi Data untuk Indikator <i>Goodwill Trust</i> terhadap Kepala Bidang Penyuluh Pertanian.....	20
Tabel 3.1. 3. Reduksi Data untuk Indikator <i>Goodwill Trust</i> terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan.....	21
Tabel 3.1. 4. Reduksi Data untuk Indikator <i>Goodwill Trust</i> terhadap Ketua dan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT).....	22
Tabel 3.2. 1 Reduksi Data untuk Indikator <i>Agreement trust</i> terhadap Kepala Bidang Penyuluh Pertanian.....	25
Tabel 3.2. 2 Reduksi Data untuk Indikator <i>Agreement trust</i> terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan.....	26
Tabel 3.2. 3 Reduksi Data untuk Indikator <i>Agreement trust</i> terhadap Ketua dan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT).....	27
Tabel 3.3. 1 Reduksi Data untuk Indikator <i>Absence of Opportunistic Behavior</i> terhadap Kepala Bidang Penyuluh Pertanian	29
Tabel 3.3. 2 Reduksi Data untuk Indikator <i>Absence of Opportunistic Behavior</i> terhadap Penyuluh Pertanian Lapangan.....	30
Tabel 3.3. 3 Reduksi Data untuk Indikator <i>Absence of Opportunistic Behavior</i> terhadap Ketua dan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT).....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	15
-------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis.....	41
Lampiran 2 Administrasi Penulis	42
Lampiran 3 Logbook Penelitian.....	45
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian	48

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

Istilah, Singkatan	Arti dan Penjelasan
<i>Trust</i>	Kepercayaan antaraktor dalam jaringan implementasi kebijakan, yang menjadi modal sosial untuk memperkuat kerja sama.
P2I	Pekarangan Pangan Lestari, program Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
KWT	Kelompok Wanita Tani; kelompok masyarakat yang beranggotakan perempuan dengan fokus pada pengelolaan pekarangan dan pertanian rumah tangga.
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan; petugas teknis yang mendampingi dan membina kelompok tani atau KWT dalam pelaksanaan program.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi publik memiliki cakupan yang luas, salah satunya berperan penting dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang telah berlangsung lama ini menuntut adanya pengambilan keputusan strategis sebagai bagian dari proses penyelesaian (Thoha, 2008). Dalam hal ini, kebijakan publik muncul sebagai solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan publik secara lebih efisien. Permasalahan tersebut muncul seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap mutu pelayanan publik, sementara di sisi lain, terdapat keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan layanan tersebut (Alwi, 2022). Oleh sebab itu, penyelesaian masalah dan pemenuhan pemerintah saja, melainkan juga membutuhkan keterlibatan organisasi non-pemerintah (NGO), sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan melalui aksi kolektif dan kolaboratif (Smith, 2007).

Salah satu aspek yang sangat memengaruhi keberhasilan jaringan kolaboratif dalam kebijakan publik ialah kepercayaan (*trust*) antaraktor. Kepercayaan yang tinggi di antara pelaku jaringan kebijakan tak hanya memperkuat kerja sama, namun juga meningkatkan efektivitas pertukaran informasi serta inovasi solusi di setiap tingkatan implementasi (Rukmana, 2022). Setelah kepercayaan terbentuk, hal ini perlu diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk menjalankan hasil kesepakatan bersama (Alwi, 2022). Dengan demikian, kepercayaan menjadi faktor sentral dalam membangun interaksi dan mencapai hasil yang diharapkan dalam tata kelola jaringan.

Kepercayaan (*trust*) dalam jaringan implementasi kebijakan mengacu pada keyakinan di antara para aktor bahwa setiap pihak akan bertindak sesuai ekspektasi bersama dan tidak akan merugikan kepentingan kelompok (Edelenbos & Klijn 2007). *Trust* berperan sebagai modal sosial yang mampu memperkuat kerja sama, memperlancar arus komunikasi, serta mengurangi potensi konflik maupun resistensi selama proses implementasi program (Yusriadi, 2025). Meski demikian, membangun kepercayaan di antara aktor-aktor yang memiliki latar belakang, kepentingan, dan tujuan yang beragam merupakan tantangan tersendiri. Ketidakpercayaan dapat menimbulkan fragmentasi dalam jaringan, lemahnya koordinasi, hingga berujung pada kegagalan pelaksanaan kebijakan, (Ansell & Gash 2008).

Isu ketahanan pangan di Indonesia tetap menjadi perhatian besar, terutama kebijakan akan kebutuhan beras yang meningkat seiring dengan penambahan penduduk. Data terakhir menunjukkan bahwa tahun 2024 Indonesia mengimpor beras sebesar 4,52 juta ton dengan nilai sebesar US\$ 2,71 miliar, melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya sekitar 3,06 juta ton. Sebagian besar pasokan beras impor tersebut datang dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan, dengan Thailand menjadi pemasok utama lebih dari 1,3 juta ton. Lonjakan impor ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, memasuki tahun 2025 tren impor beras justru menurun tajam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada periode Januari–Maret 2025 volume impor hanya sekitar 112 ribu ton, anjlok lebih dari 92 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 1,44 juta ton. Penurunan ini tak lepas dari upaya pemerintah memperkuat ketersediaan beras dalam negeri, salah satunya melalui target pengadaan Bulog sebesar 3 juta ton di tahun 2025. Meski begitu, pemerintah tetap membuka kemungkinan impor terbatas, misalnya dari India, untuk memastikan cadangan beras nasional tetap aman bila produksi dalam negeri belum mencukupi.

Di Kabupaten Maros, isu ketahanan pangan menjadi perhatian utama yang membutuhkan penanganan serius. Sebagai salah satu daerah agraris di Indonesia, Maros memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun juga menghadapi tantangan seperti alih fungsi lahan, keterbatasan akses teknologi pertanian, kurangnya tenaga kerja terampil, dan minimnya infrastruktur pendukung. Kepercayaan menjadi fondasi dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi, mengurangi konflik, serta membangun komitmen bersama di antara para aktor dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan (Agrawal et al., 2019).

Di Sulawesi selatan, Kabupaten Maros menjadi salah satu wilayah yang sepenuhnya mengembangkan sektor pertanian. Observasi awal peneliti Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan di Maros di Maros di bidang Penyuluh Pertanian telah melakukan berbagai upaya kolaboratif dengan Kelompok Wanita Tani (KWT), namun masih terdapat kendala seperti perbedaan pemahaman, keterbatasan fasilitas, jarak tempuh, dan intensitas pendampingan. Selain itu, masalah juga muncul dari internal lembaga, seperti keterbatasan sumber daya aparatur dan jumlah tenaga pendamping yang belum memadai. Sinkronisasi data terkait produktivitas pertanian dan ketahanan pangan pun belum berjalan secara optimal. Keberlanjutan tata kelola sektor pertanian sangat bergantung pada partisipasi berbagai pihak, termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT) yang memiliki peran penting dalam kelembagaan petani.

Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan regional. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan setempat telah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti penyuluhan pertanian dan kelompok wanita tani (KWT), Namun, pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi hambatan, terutama karena rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor yang menyebabkan lemahnya koordinasi. Menurut (Klijn & Koppenjan 2016) Akibatnya, implementasi kebijakan tidak berjalan optimal dan belum memberikan dampak signifikan di lapangan. Salah satu faktor kunci yang seringkali menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya *trust* atau kepercayaan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan implementasi kebijakan.

Pemerintah juga mendorong penguatan ketahanan pangan melalui Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dilaksanakan oleh kementerian pertanian. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pelaksanaannya melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai aktor utama. Di Kabupaten Maros, P2L merupakan salah satu upaya strategis membangun ketahanan pangan lokal. Namun efektivitas pelaksanaan program ini tidak hanya

bergantung kepada sumber daya yang tersedia maupun sarana produksi, tetapi juga tingkat kepercayaan antara aktor baik antara pemerintah dengan anggota KWT sendiri. Rendahnya tingkat *trust* dapat memicu lemahnya koordinasi dan partisipasi, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan P2L.

Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme kerja jaringan menjadi hambatan utama dalam membangun kepercayaan. Banyaknya pihak yang terlibat dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda membuat kolaborasi semakin rumit (Susanti. dkk., 2023). Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros menghadapi tantangan koordinasi antar aktor yang cukup kompleks. Rendahnya tingkat kepercayaan antara pelaku, seperti instansi pemerintah, penyuluh pertanian, dan kelompok wanita Tani, menjadi salah satu kendala utama dalam membangun sinergi kebijakan. Kunci agar kolaborasi berjalan efektif adalah adanya kepercayaan (*trust*) di antara aktor-aktor dalam jaringan implementasi.

Upaya membangun *trust* dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Maros menghadapi hambatan yang cukup kompleks, terutama akibat perbedaan pandangan antara pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain itu, faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, keterbatasan akses informasi, serta pengalaman negatif dari program pemerintah sebelumnya turut memengaruhi tingkat kepercayaan antar aktor. Padahal, dalam konteks desentralisasi dan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, *trust* menjadi pondasi utama untuk menciptakan sinergi dan keberlanjutan program ketahanan pangan (Putnam, 2000).

Penelitian mengenai *trust* dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Maros menjadi sangat relevan, mengingat pentingnya peran *trust* dalam memperkuat implementasi kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori jaringan kebijakan serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika *trust* dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan, serta implikasinya terhadap keberhasilan program ketahanan pangan di Maros.

Kompleksitas permasalahan ketahanan pangan tidak hanya disebabkan oleh tidak sepahaman terhadap mekanisme kerja jaringan, tetapi juga oleh tumpang tindih peran dan perbedaan kepentingan yang memperkuat fragmentasi serta menghambat pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ketahanan pangan yang kompleks tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan koordinasi dan interaksi jaringan di lingkungan pemerintah. Untuk menciptakan interaksi yang efektif, peningkatan kepercayaan dalam jaringan implementasi sangat diperlukan.

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi rujukan untuk penelitian ini adalah:

“Di Kabupaten Maros, pelaksanaan Program Pangan Lestari (P2L) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal,

dengan melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pelaku utama. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan (*trust*) di antara para aktor yang terlibat, seperti pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan anggota KWT itu sendiri. Kolaborasi dalam jaringan kebijakan ini menghadapi sejumlah hambatan, antara lain perbedaan persepsi, keterbatasan sarana, serta ketidakmerataan intensitas pendampingan. Oleh karena itu, penelitian ini akan merujuk pada aspek kepercayaan dalam jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Maros”

Berdasarkan dinamika kolaborasi dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kabupaten di Maros, yang melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, serta Kelompok Wanita Tani (KWT), dapat diamati bahwa keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh adanya kepercayaan antar para pelaku. Hal ini tetap terjaga meskipun terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana produksi, perubahan fungsi lahan, ketidakseimbangan anggota. Keberlanjutan kolaborasi di tengah hambatan-hambatan tersebut menegaskan efektivitas pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti **“Trust dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Maros”**

1.2. Tinjauan Teori

1.2.1. Kepercayaan (*trust*) dalam Jaringan

Kepercayaan (*trust*) dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan terbentuk melalui interaksi dinamis antara berbagai aktor dan kepentingan yang terhubung lewat kerja sama lintas sektor. Proses pembentukan *trust* dipengaruhi oleh transparansi komunikasi, integritas para pemangku kepentingan, serta konsistensi dalam implementasi kebijakan dari tahap produksi hingga konsumsi pangan, (Budiman, 2021) Komunikasi terbuka tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi landasan utama dalam memperkuat *trust* dalam kebijakan ketahanan pangan. Oleh karena itu, integritas dan konsistensi sangat berperan menjaga keberlanjutan *trust* di jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan.

Menurut (Klijn, 2010) *trust* atau Kepercayaan merupakan peran penting dalam membentuk interaksi dan mencapai hasil yang diharapkan dalam jaringan tata kelola. Kepercayaan yang terbangun dalam sebuah jaringan tata kelola tidak sekedar merefleksikan kualitas interaksi antar para pelaku, melainkan juga berfungsi sebagai fondasi awal terciptanya komitmen bersama terhadap sasaran yang di setujui. Dengan cara ini, kepercayaan menciptakan harapan positif terhadap lahirnya perilaku kooperatif, sehingga kemungkinan kegagalan koordinasi dapat diatasi melalui mekanisme self-enforcing yang lahir dari relasi kepercayaan itu sendiri. dari seluruh pihak dalam menjaga integritas dan konsistensi perilaku. Dengan demikian, *trust* dapat dianggap sebagai elemen yang kompleks namun sangat penting dalam menunjang kinerja jaringan secara keseluruhan, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam pencapaian tujuan bersama (Klijn, Edelenbos, & Steijn, 2010).

Kepercayaan dipahami sebagai persepsi yang positif dan konsisten terhadap itikad baik mitra dalam jaringan, termasuk keyakinan bahwa pihak lain akan menepati janji serta menghindari tindakan yang merugikan secara sepihak. Ketika tingkat kepercayaan di antara aktor tinggi, interaksi menjadi lebih transparan, pertukaran

informasi semakin lancar, dan ketidakpastian dapat diminimalkan. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat efektivitas kolaborasi dan memfasilitasi terciptanya solusi bersama untuk permasalahan kebijakan publik, (George et al., 2024). Kepercayaan memiliki peran strategis dalam menghadapi ketidakpastian yang berasal dari luar jaringan tata kelola. Maka dari itu, kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar, tetapi juga sebagai penopang utama ketahanan lembaga dan keunggulan kolaborasi dalam lingkungan tata kelola.

Selain hubungan timbal balik antara kepercayaan dan tingkat kepadatan jaringan yang tinggi bukan saja memperlancar penyebaran informasi dan alokasi sumber daya, melainkan juga menumbuhkan norma-norma kolektif yang memperkuat integrasi antaranggota. Kepercayaan berperan sebagai fondasi yang menopang pertukaran pengetahuan dan sumber daya lain, yang pada gilirannya mendorong penguatan tata kelola jaringan serta memperdalam komitmen individu terhadap tujuan bersama, (Sankowska, 2015). Oleh karena itu, kepercayaan sebagai fondasi hubungan sosial dalam suatu jaringan membawa implikasi yang luas, meliputi terciptanya norma bersama, penguatan komitmen antar anggota serta memiliki pengaruh komprehensif, bukan saja sebagai perekat komunikasi, muncul juga sebagai penggerak utama munculnya kultur organisasi yang terbuka dan mampu beradaptasi dengan kompleksitas.

Aspek kepercayaan ini sangat penting karena struktur jaringan sendiri mengakui adanya ketergantungan timbal balik antara aktor-aktor yang memiliki tujuan, kepentingan, dan sumber daya yang beragam. Kepercayaan berperan dalam memperlancar pertukaran informasi. Oleh sebab itu, kepercayaan menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan efisiensi kerja sama. Selain itu, kepercayaan juga berkontribusi dalam menyederhanakan proses negosiasi yang kerap kali diwarnai konflik kepentingan di antara anggota jaringan. Keberhasilan sebuah jaringan sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku sebagai bentuk modal sosial yang memperkuat kolaborasi. Dengan demikian, kepercayaan dalam jaringan tidak hanya lahir dari hubungan antar individu, melainkan juga merupakan hasil dari interaksi yang terstruktur secara institusional di antara para anggota (Klijn, Edelenbos, & Steijn, 2010).

Keterbukaan kebijakan serta akses terhadap data dan informasi menjadi syarat penting agar anggota jaringan dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Jika interaksi didasari oleh prinsip keadilan, konsistensi, dan keterbukaan, maka potensi munculnya kecurigaan dan resistensi dapat diminimalisir. Oleh karena itu, proses pembentukan kepercayaan dalam jaringan sangat erat kaitannya dengan komunikasi dan transparansi sebagai modal relasional yang menopang stabilitas jaringan (Klijn & Koppenjan, 2016).

Kepercayaan dalam jaringan juga sangat terkait dengan upaya mengelola ketidakpastian dan risiko dalam kolaborasi lintas aktor. Ketiadaan kepercayaan dapat menimbulkan keraguan terhadap komitmen dan kepatuhan anggota, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan bersama. Kunci dalam mengelola ketidakpastian adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kejelasan peran, pembagian tanggung jawab, serta kepastian hukum bagi setiap pihak dalam jaringan. Penguatan rasa saling percaya memungkinkan anggota bertindak secara kolektif, sehingga solusi inovatif dapat dirumuskan untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar institusi. Tingkat kepercayaan yang tinggi menghasilkan koherensi dalam

tindakan strategis dan mempercepat proses pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme pelindung terhadap potensi kegagalan kolaborasi (Klijn & Koppenjan, 2004). Pada akhirnya, kepercayaan dalam jaringan menjadi fondasi utama keberhasilan interaksi kolaboratif.

Kompleksitas yang muncul dalam jaringan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan menggambarkan pola hubungan yang terbentuk di antara beragam aktor serta institusi yang berperan dalam mencapai sasaran ketahanan pangan sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, (Suryana, 2014). Keberhasilan pelaksanaan jaringan kebijakan sangat ditentukan oleh koordinasi dan kerjasama yang terbangun secara konsisten di antara seluruh pihak yang terlibat. Koordinasi ini sangat penting terutama ketika jaringan menghadapi tantangan besar, seperti alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim, atau keterbatasan kapasitas kecil yang merupakan bagian integral dari strategi ketahanan pangan nasional.

Proses pembentukan *trust* sangat bergantung pada transparansi, yang memperkuat akuntabilitas setiap aktor, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil didasari oleh rasa saling percaya yang kokoh. Dengan demikian, *trust* tidak muncul secara instan, melainkan berkembang secara bertahap melalui pengakuan terhadap komitmen bersama, konsistensi perilaku, dan keterbukaan dalam berpartisipasi pada interaksi jaringan. Dengan perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan pilar utama dalam dinamika kerja sama pada jaringan implementasi kebijakan, (Klijn, Edelenbos & Steijn 2010). *trust* dalam jaringan sangat erat kaitannya dengan penerimaan nilai-nilai normatif yang mengatur peran dan tanggung jawab kolektif setiap aktor. Hal ini menunjukkan bahwa *trust* tidak hanya bersumber dari pengalaman empiris, tetapi juga memerlukan keterikatan pada norma-norma yang disepakati bersama. Keterikatan terhadap nilai-nilai normatif ini melahirkan sikap saling menghormati, yang menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan *trust* sepanjang proses kolaborasi.

1.2.1. Jaringan Implementasi kebijakan

Jaringan implementasi kebijakan merupakan suatu konfigurasi hubungan antar aktor di mana proses pelaksanaan kebijakan terjadi secara terpadu melalui interaksi, koordinasi, dan pertukaran sumber daya yang saling tergantung satu sama lain (Klijn & Koppenjan 2016). Pola hubungan dalam jaringan ini membentuk sebuah sistem sosial yang kompleks, di mana aktor-aktor yang terlibat tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memengaruhi efektivitas implementasi. Keberadaan jaringan ini menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan tidak lagi bersifat linier, melainkan terjadi secara simultan melalui dinamisasi hubungan antar beragam pihak yang memiliki peran, kepentingan, dan otoritas berbeda-beda. Melalui mekanisme interaksi ini, jaringan implementasi kebijakan berfungsi sebagai platform bagi pertukaran informasi, pembentukan konsensus, serta negosiasi terkait strategi pelaksanaan. Dengan demikian, jaringan implementasi kebijakan menuntut adanya upaya membangun sinergi dan kepercayaan di antara seluruh unsur yang terlibat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Konfigurasi relasi dalam jaringan implementasi kebijakan sangat erat kaitannya dengan mekanisme tata kelola yang menuntut adanya koordinasi lintas sektor. Koordinasi ini dapat tercapai melalui interaksi yang bersifat formal maupun

informal antar sesama aktor jaringan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, serta pihak swasta yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Sebuah jaringan implementasi kebijakan yang efisien tidak hanya ditentukan oleh keberagaman aktor, tetapi juga oleh intensitas interaksi dan kualitas komunikasi yang berlangsung di antara anggota jaringan tersebut. Kualitas komunikasi dalam jaringan sangat menentukan laju pertukaran informasi dan efektivitas koordinasi lintas sektoral, (Mediansyah 2019). Dengan demikian, semakin terjalinnya kepercayaan (*trust*) akan memperbesar kemungkinan tercapainya tujuan kebijakan secara efektif, sekaligus mengurangi potensi konflik antar pemangku kepentingan.

Efisiensi dalam jaringan implementasi kebijakan tercermin dari kemampuan anggota jaringan untuk membangun kolaborasi yang adaptif terhadap dinamika lingkungan kebijakan. Adaptasi pada konteks jaringan ini dimungkinkan melalui pembagian tanggung jawab dan pengelolaan sumber daya secara kolektif, sehingga kelancaran proses pelaksanaan kebijakan dapat terjamin. Kolaborasi tersebut akan berjalan dengan baik jika didukung oleh adanya keterbukaan informasi, pembagian peran secara proporsional, serta kejelasan mekanisme pengambilan keputusan. Selanjutnya, efisiensi dalam jaringan juga dipengaruhi oleh kemampuan para aktor untuk mengatasi hambatan komunikasi dan mengantisipasi kemungkinan resistensi yang dapat mengganggu proses implementasi, (Akib 2010).

Struktur dan dinamika jaringan implementasi kebijakan turut menentukan keberhasilan integrasi antara tujuan kebijakan dan realisasi di lapangan. Struktur jaringan yang inklusif dapat mengakomodasi keanekaragaman perspektif, sehingga muncul ruang dialog yang konstruktif antar anggota. Dialog ini penting dalam rangka membangun kesepahaman bersama dan mengeliminasi bias informasi yang dapat menghambat terlaksananya kebijakan secara menyeluruh. Dalam perspektif ini, jaringan implementasi memainkan peranan sentral sebagai penghubung antara kebijakan makro yang dibuat oleh pembuat kebijakan dengan tindakan mikro di tingkat pelaksana. Artikulasi peran dan fungsi tiap aktor dalam jaringan yang jelas sangat penting untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses implementasi (Klijn & Koppenjan, 2016). Hubungan saling ketergantungan yang ada dalam jaringan menjadi faktor pendorong utama tercapainya hasil kebijakan yang diharapkan.

1.2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *trust* dalam jaringan implementasi kebijakan sebelumnya sebagai perbandingan pengembangan fokus penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul	Tujuan	Hasil
1.	(Agustian et al., 2023)	NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN	Bertujuan untuk mengevaluasi governance network dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dengan focus utama pada pola interaksi antar pelaku dalam jaringan kebijakan	Menekankan pentingnya <i>trust</i> , pertukaran informasi, dan sumber daya di antara para pelaku kebijakan baik pemerintah maupun swasta. Selain itu, aspek kepercayaan antar aktor yang menjadi kunci kelancaran implementasi belum dikaji secara mendalam.
2.	Klijn, Edelenbos, Steijn, (2010)	<i>Trust in Governance networks: Its Impacts on Outcomes</i>	Bertujuan untuk kepercayaan (<i>trust</i>) mempengaruhi hasil (outcomes) proyek lingkungan dalam jaringan governance di Belanda dan apakah manajemen jaringan secara aktif dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dalam jaringan tersebut.	- Menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan di antara aktor dalam jaringan governance memiliki dampak signifikan terhadap outcomes yang dirasakan, baik pada aspek proses maupun konten. - <i>trust</i> sering dianggap penting dalam berbagai literatur organisasi dan bisnis, namun belum banyak dikaji secara empiris dalam konstelasi governance network di ranah administrasi publik.
3.	Alwi & Tahili, 2017	Creating a <i>Trusted</i> Public Organization: Organizational <i>Trust</i> Analysis in Implementation Network of the Education Quality	Bertujuan untuk mengkaji kepercayaan organisasi dalam konteks jaringan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, serta menawarkan model kepercayaan organisasi yang terintegrasi guna	Kepercayaan (<i>trust</i>) menjadi penggerak utama efektivitas implementasi kebijakan. Perlunya penguatan tiga dimensi kepercayaan dan penerapan model kepercayaan integrative pada jaringan implementasi kebijakan lain agar hasil yang dicapai lebih optimal.

		Assurance Policy in Indonesia	meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan	
4.	Rukmana, Alwi, Susanti, (2019)	Complexity and Public Policy: Network Model of Food Security Policy Implementation in Bone Regency	Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model jaringan dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, serta mengevaluasi faktor-faktor kompleksitas dan efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan selama proses implementasi.	kolaborasi yang efektif hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang intensif, pemahaman terhadap kepentingan masing-masing aktor, serta pengelolaan jaringan yang baik. Namun, aspek kepercayaan antar aktor belum menjadi fokus utama, sehingga membuka peluang untuk penelitian lanjutan mengenai bagaimana <i>trust</i> dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan.
5.	(Schilke & Cook, 2013)	A cross-level process theory of <i>trust</i> development in interorganizational relationships	Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah model teoretis yang menggambarkan proses terbentuk, berubah, dan berkembangnya kepercayaan dalam relasi antarorganisasi, baik pada level individu maupun organisasi, sepanjang berbagai fase kolaborasi antarorganisasi.	- Menegaskan bahwa kepercayaan antarorganisasi bersifat dinamis dan berkembang seiring tahapan hubungan serta interaksi antara level mikro dan makro. - pentingnya memahami perbedaan karakteristik kepercayaan antarlevel, tantangan dalam proses transformasi kepercayaan, serta perlunya penelitian empiris lebih lanjut, khususnya pada konteks jaringan implementasi kebijakan publik.
6.	(Sloan & Oliver, 2013)	Building <i>Trust</i> in Multi-stakeholder Partnerships: Critical Emotional Incidents and Practices of Engagement	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kepercayaan dibangun dalam kemitraan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, dengan penekanan pada peran insiden emosional penting dan praktik keterlibatan emosional di antara para pihak yang terlibat.	- proses pembentukan kepercayaan dalam kemitraan multi-pemangku kepentingan bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh insiden emosional yang signifikan. Insiden-insiden tersebut, yang seringkali terjadi secara tiba-tiba dan sarat emosi, menjadi momen penting dalam hubungan antar mitra. - Praktik keterlibatan emosional seperti membuka ruang diskusi, mengajukan pertanyaan yang menantang, serta berbagi pengalaman pribadi, terbukti dapat mengubah emosi negatif menjadi positif dan memperkuat kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

7.	Emborg, Daniels, Walker (2012).	A Framework for Exploring <i>Trust</i> and <i>Distrust</i> in Natural Resource Management	Bertujuan untuk Membangun kerangka konseptual untuk memahami trust (kepercayaan) dan distrust (ketidakpercayaan) secara simultan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (natural resource management).	<i>Trust</i> pada tingkat individu (micro-level) lebih mudah diubah melalui interaksi langsung, sementara <i>trust</i> terhadap institusi (macro-level) lebih sulit berubah karena terkait norma sistemik, birokrasi, atau budaya organisasi.
8.	(Klijn, 2004)	Managing Uncertainties in Networks: A Network Approach to Problem Solving and Decision Making	Bertujuan untuk Menganalisis dan mengembangkan kerangka konseptual dalam memahami serta menangani berbagai macam ketidakpastian (substansif, strategis, dan institusional) yang muncul pada proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di dalam jejaring kebijakan.	- Penelitian ini menjelaskan bahwa respons konvensional seperti penambahan pengetahuan melalui penelitian atau sentralisasi wewenang seringkali gagal menyelesaikan masalah karena abai terhadap dinamika multi-aktor dan kompleksitas institusional yang berkembang dalam jaringan. - penelitian ini lebih fokus pada aspek konseptual sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji efektivitasnya secara kontekstual dan memperdalam aspek-aspek spesifik, seperti peranan <i>trust</i> dalam membangun dan memelihara kerja sama di tingkat jaringan implementasi kebijakan pada sektor tertentu.
9.	(George et al., 2024)	Do network management and <i>trust</i> matter for network outcomes? A meta-analysis and research agenda	Penelitian ini bertujuan Mengintegrasikan dan menganalisis temuan studi kuantitatif terkait pengaruh manajemen jaringan (network management) dan kepercayaan (<i>trust</i>) terhadap hasil (outcome) dalam jaringan kebijakan publik, serta mengidentifikasi variasi sumber hubungan tersebut untuk membangun agenda penelitian selanjutnya.	- Manajemen jaringan dan kepercayaan secara signifikan dan positif memengaruhi outcomes jaringan. - Kepercayaan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan manajemen jaringan terhadap outcomes jaringan, terutama dalam meningkatkan outcome proses (process outcomes).

10.	(Klijn & Koppenjan, 2012)	Governance network theory: past, present and future	Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan perkembangan teori governance network dari awal hingga menjadi paradigma utama dalam administrasi publik, serta menyoroti tantangan dan arah di masa depan bagi aplikasi teori ini, terutama dengan kemunculan konsep New Public Governance (NPG).	Penelitian ini menemukan adanya konvergensi berbagai tradisi riset jaringan ke dalam inti konsep yang menekankan pentingnya interaksi aktor, teknik manajemen jaringan, serta peran kepercayaan dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi kebijakan publik.
11.	(Martins et al., 2019)	Activities in the Context of a Network, <i>Trust</i> and Internal Resources as Antecedents of the Effectiveness of Network Governance: a Study of the Impact on the Performance of the Companies Involved	Meneliti pengaruh aktivitas jaringan, kepercayaan, dan sumber daya internal terhadap efektivitas tata kelola jaringan serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan yang tergabung di dalamnya, khususnya di lingkungan Federation of Industries of the State of Minas Gerais (FIEMG), Brazil.	- <i>Trust</i> (kepercayaan) dan internal resources (sumber daya internal) berpengaruh signifikan serta positif terhadap efektivitas tata kelola jaringan (network governance). - Studi ini menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan sekaligus menguatkan kualitas sumber daya internal jaringan untuk mencapai tata kelola yang efektif.
12.	(Cerna Lucie, 2014)	What it is and Why it Matters for Governance and Education	Bertujuan untuk <i>trust</i> (kepercayaan) memiliki peran penting dalam tata kelola (governance), khususnya di sektor pendidikan, dengan mengulas definisi, pengukuran, model keterkaitannya dalam tata kelola, serta pengaruhnya terhadap berbagai aspek seperti kompleksitas, asimetri, kerjasama, akuntabilitas, dan profesionalisasi.	- <i>Trust</i> dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kerjasama, mempercepat inovasi, dan mendukung pembentukan konsensus dalam tata kelola pendidikan. Disimpulkan bahwa <i>trust</i> merupakan komponen sentral dalam keberhasilan reformasi kebijakan publik dan tata kelola Pendidikan - Keberadaan <i>trust</i> juga menunjang konsensus dan efektivitas implementasi kebijakan, sementara kekurangannya dapat menyebabkan kegagalan reformasi, resistensi, hingga kelelahan aktor implementasi. Penulis juga membahas kendala dalam pengukuran <i>trust</i> secara global serta variasinya

				antarnegara dan lembaga, serta membedakan antara <i>trust</i> dan kontrol formal.
13.	(Roozee et al., 2024)	Managing inter-organizational <i>trust</i> and risk perceptions in transboundary fisheries <i>governance networks</i>	Bertujuan untuk Menjelaskan interaksi antara mekanisme kendali, dimensi kepercayaan, dan persepsi risiko dalam jaringan pengelolaan perikanan lintas batas, khususnya di ekosistem Salish Sea, dan memberikan pemetaan kuantitatif atas hubungan tersebut untuk memperkuat kolaborasi dalam tata kelola sumber daya alam.	- Rekomendasi studi menyoroti pentingnya diversifikasi mekanisme kontrol untuk memperkuat relasi kepercayaan antar organisasi, mengurangi persepsi risiko, dan pada gilirannya memperkuat jaringan kolaborasi dalam tata kelola sumber daya. - Studi ini memberikan literasi penting terkait manajemen kepercayaan dan risiko dalam konteks kolaborasi kebijakan lintas batas, serta menawarkan pijakan empiris untuk penguatan tata kelola jejaring di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya, termasuk sektor pangan.
14.	(Hartina, Alwi, Susanti 2020)	<i>Trust</i> in the Network of Food Diversification Policy Implementation in Bone Regency	Bertujuan untuk bagaimana kepercayaan (<i>trust</i>) dalam jaringan aktor berpengaruh terhadap implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Bone dan mengidentifikasi efektivitas serta tantangan yang muncul dalam kerjasama antar aktor terkait.	pentingnya <i>trust</i> dalam jaringan pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan di Bone Regency. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini meneliti interaksi antara Dinas Ketahanan Pangan, petugas penyuluh, dan Kelompok Wanita Tani. Dengan mengacu pada ketiga dimensi <i>trust</i> — <i>goodwill trust</i> , <i>agreement trust</i> , dan <i>absence of opportunistic behavior</i> —penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan di Bone belum berjalan efektif akibat minimnya <i>trust</i> di antara para pelaku.

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Sejauh ini, sejumlah studi telah membahas *Trust* dalam Implementasi kebijakan dari berbagai sudut pandang, seperti dalam riset Hartina, Alwi, dan Susanti (2020). kajian tersebut secara spesifik membahas kepercayaan (*trust*) dalam jaringan implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Bone, sehingga menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Dalam artikelnya, para peneliti menekankan bahwa *trust* memegang peranan penting sebagai inti dari efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama dalam konteks kerja sama antar aktor dalam suatu jaringan implementasi.

Riset yang juga relevan dan menjadi dasar utama adalah Klijn, Edelenbos, dan Steijn (2010) yang membahas secara mendalam mengenai *trust* dalam konteks jaringan kebijakan (*governance networks*). Artikel ini memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai bagaimana kepercayaan terbentuk, berfungsi, dan memengaruhi efektivitas jaringan kolaboratif dalam implementasi kebijakan publik. Relevansi artikel ini diperkuat dengan fokus penelitian yang menyoroti *trust* antaraktor dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain itu, konsep *trust* yang dikembangkan oleh Klijn (2010) juga diperkuat oleh pandangan George et al. (2024) dan Edelenbos & Klijn (2007) yang menempatkan *trust* sebagai fondasi dalam membangun interaksi yang produktif di dalam jaringan kebijakan.

Sementara itu, artikel-artikel lain seperti dari Budiman (2021), Suryana (2014), Rukmana (2022), Agrawal et al. (2019), dan Alwi (2022) berfungsi sebagai pendukung dalam memahami dinamika lokal, tantangan implementasi di daerah, serta faktor sosial dan kelembagaan yang turut mempengaruhi pembentukan *trust*. Artikel-artikel ini memperkaya pemahaman kontekstual mengenai realitas lapangan, memperjelas urgensi dan kompleksitas persoalan ketahanan pangan di Kabupaten Maros, serta memberikan ilustrasi mengenai tantangan koordinasi dan kolaborasi yang terjadi di tingkat daerah. Dengan demikian, seluruh artikel tersebut secara bersama-sama memperkuat landasan teoritis dan empiris penelitian ini.

Oleh karena itu, relevansi dan kebaruan riset ini terletak pada upayanya dalam menawarkan perspektif baru mengenai kepercayaan (*trust*) dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menelusuri dan memahami dinamika kepercayaan di antara para aktor pelaksana kebijakan, tetapi juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman akademik mengenai *trust* dalam konteks kebijakan publik, khususnya di sektor ketahanan pangan. Melalui pendekatan tersebut, riset ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi perbaikan strategi implementasi kebijakan serta memperkuat kolaborasi antaraktor melalui pembangunan dan pengelolaan kepercayaan yang lebih efektif. Untuk mengkaji kepercayaan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga dimensi *trust* sebagaimana dikemukakan oleh Sako (1998) dan Rousseau et al. (1998), yaitu *goodwill trust*, *Agreement trust*, dan *Absence of Opportunistic Behavior* :

a. *Goodwill Trust*

Menekankan bahwa adanya niat baik dan sikap positif antara para pihak. Klijn, Edelenbos, Steijn (2010), Menurut Kepercayaan memberikan peluang bagi setiap aktor untuk mengedepankan niat baik dan mencegah munculnya kepentingan pribadi yang berlebihan dalam suatu kerja sama, dengan demikian, *trust* tidak hanya merupakan sikap internal dari individu atau organisasi, melainkan juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya kolaborasi yang berkelanjutan.

Menurut Xue et al. (2017), *goodwill trust* berperan penting dalam memperkuat kolaborasi antar-aktor, yang berdampak pada berkurangnya perilaku oportunistik dalam suatu kemitraan, dalam konteks jaringan implementasi kebijakan menunjukkan bahwa membangun *goodwill trust* diantara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal, dapat menjadi kunci untuk menciptakan kerja sama yang solid dan meminimalkan tindakan oportunistik yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa *goodwill trust* sering kali muncul dalam praktik kelompok tani atau KWT ketika anggota saling membantu tanpa pamrih. Misalnya, dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), anggota KWT di beberapa daerah saling berbagi benih dan hasil panen untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Penelitian Hartina, Alwi, & Susanti (2020) di Bone menemukan bahwa niat baik antaraktor sangat berperan dalam mendukung keberhasilan kebijakan diversifikasi pangan, meskipun keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala. Ini menunjukkan bahwa *goodwill trust* dapat menumbuhkan solidaritas dan mengurangi sikap individualistik dalam jaringan kebijakan pangan.

b. *Agreement trust*

Agreement trust Menjadi indikator penting setiap pihak yang terlibat mampu menjalankan peran dan tanggungjawab sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. *Agreement trust* memastikan bahwa setiap anggota atau institusi mematuhi aturan dan perjanjian yang telah disepakati, sehingga tercipta stabilitas dalam pola hubungan yang ada. Apabila *agreement trust* tidak terwujud, maka kemungkinan terjadinya konflik dan kegagalan dalam implementasi tindakan kolektif akan semakin besar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *trust* melalui dimensi *agreement trust* memberikan kontribusi signifikan terhadap integrasi sosial dan kelancaran komunikasi antar pihak.

Dalam pelaksanaannya, *agreement trust* sering kali diujikan saat aktor perlu mengikuti aturan bersama. Contoh nyata muncul dalam pengelolaan bantuan pupuk dan benih oleh kelompok tani di Sulawesi Selatan. Rukmana, Alwi, & Susanti (2019) mencatat bahwa rendahnya patuh terhadap perjanjian distribusi input pertanian mengakibatkan konflik internal di antara kelompok. Sebaliknya, saat para aktor bertekad untuk melaksanakan kesepakatan seperti pembagian hasil panen berdasarkan aturan KWT muncullah stabilitas dalam kolaborasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepercayaan dalam kesepakatan bukan hanya mengenai dokumen tertulis, tetapi juga tentang kepatuhan etis dan konsistensi dalam penerapan kebijakan pangan.

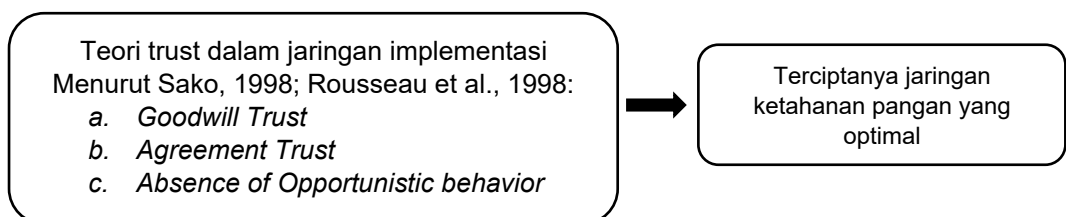
c. *Absence of Opportunistic behavior*

Menurut (Sako, 1998; Rousseau et al., 1998), Berfungsi menjaga agar hubungan yang terjalin tetap berada dalam koridor etika dan saling menghormati. Jika dalam suatu hubungan terdapat kecenderungan untuk bertindak secara oportunistik, maka *trust* yang telah dibangun dapat dengan mudah hancur, sehingga kolaborasi menjadi tidak efektif. Esensi dari *absence of opportunistic behavior* inilah yang memperkuat *trust* sebagai modal sosial utama dalam membangun hubungan jangka panjang. Dengan demikian, *trust* melalui ketiga dimensinya tidak hanya berperan sebagai

aspek psikologis, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlangsungan interaksi sosial secara efektif dan efisien.

Fenomena oportunistik kerap muncul dalam pelaksanaan kebijakan saat terdapat aktor yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, seperti menguasai bantuan program atau kurang transparan dalam pelaporan. Berdasarkan kajian Agustian et al. (2023), tindakan seperti ini sering kali mengurangi kolaborasi di dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan akibat mengurangi kepercayaan antar pihak. Namun, ketika semua pihak mempertahankan integritas seperti dalam program ketahanan pangan berbasis kelompok, para aktor menghindari penyalahgunaan bantuan kepercayaan yang terwujud dapat bertahan lebih lama dan mendorong kerjasama jangka panjang. Demikian pula, studi Hartina, Alwi, dan Susanti (2020) di Bone menemukan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan akibat oportunistik menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan.

1.2.3. Kerangka Pikir



Sumber : Olahan Peneliti, 2025

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana *goodwill trust*, *agreement trust*, dan *absence of opportunistic behavior* dapat meningkatkan kepercayaan dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Maros.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini mengembangkan ilmu administrasi publik, terutama dalam aspek implementasi kebijakan yang mengedepankan tata kelola berbasis jaringan. Fokus utama penelitian ini adalah menekankan pentingnya kepercayaan (*trust*) antar pelaku sebagai kunci utama keberhasilan kolaborasi. Dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Klijn, Edelenbos, & Steijn, penelitian ini memperluas wawasan teoretis terkait dinamika interaksi sosial dalam jaringan kebijakan, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut mengenai peran *trust* dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di tingkat lokal.

b) Manfaat praktis

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan empiris sekaligus bahan pertimbangan strategis bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan

ketahanan pangan, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agar lebih efektif, khususnya melalui penguatan aspek kepercayaan (*trust*) antar pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan tercipta pola kolaborasi yang optimal guna menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mampu merespons berbagai tantangan yang ada.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji fenomena *trust* dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Pendekatan kualitatif dipilih penulis karena diyakini mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap interaksi dan dinamika sosial yang terjadi di antara berbagai aktor dalam implementasi kebijakan. Serta menjelaskan proses dan strategi kepercayaan antar aktor dalam meningkatkan kinerja. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang diberikan individu maupun kelompok terhadap persoalan sosial tertentu.

2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain studi kasus. Menurut Yin (2014), studi kasus didefinisikan sebagai suatu penelitian empiris yang mengeksplorasi fenomena dalam konteks di mana batas-batas antara fenomena dan lingkungannya tidak terlihat secara tegas. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang mendalam terkait kepercayaan (*trust*) dalam jaringan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros.

Desain penelitian studi kasus dipilih oleh peneliti karena peneliti membutuhkan analisis yang mendalam dari suatu fenomena *trust* dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Fenomena tersebut merupakan isu bersifat kontemporer, sehingga pendekatan studi kasus di pandang tepat untuk menggali secara mendalam sesuai dengan konteks dan karakteristik kasus yang diteliti.

2.3 Prosedur penelitian

2.3.1 Penentuan Informan

Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan pemilihan didasarkan pertimbangan tertentu. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh data yang mendalam dari individu yang di anggap memiliki wawasan, pengalaman, atau posisi strategis terkait fenomena yang diteliti. Creswell dan Poth (2018) juga menegaskan bahwa *purposive sampling* sangat relevan dalam riset kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada kasus-kasus yang benar-benar informatif, sehingga eksplorasi isu dapat dilakukan secara lebih mendalam meski dengan keterbatasan waktu dan sumber daya.

oleh karena itu informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
2. Badan Penyuluhan Pertanian
3. Ketua Kelompok Wanita Tani
4. Anggota Kelompok Wanita Tani

2.3.2 Data

a. Observasi

Observasi peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas dan perilaku komunikasi yang dilakukan, Creswell (2013). Observasi dapat dikaitkan dengan proses merumuskan serta membandingkan permasalahan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam guna merumuskan pertanyaan yang nantinya digunakan dalam penyusunan angket atau kuesioner. Selain itu, observasi juga berperan dalam menentukan strategi pengumpulan data serta memilih bentuk pemahaman yang dinilai paling sesuai.

Dalam observasi ini peneliti mencatat segala hal yang dilihat, didengar, maupun dirasakan, sebab observasi berfokus pada pencatatan fakta, bukan pendapat pribadi. Namun, sebelum observasi dilaksanakan, peneliti biasanya menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan berdasarkan gambaran informasi yang telah diperoleh, serta menetapkan tujuan observasi dan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya, oleh karena itu observasi melibatkan pencatatan data atau informasi yang ditemukan, baik berupa data primer maupun sekunder. Pelaksanaan observasi dilakukan secara langsung di lapangan, yakni di Kabupaten Maros, dengan menemui informan yang relevan.

b. Wawancara

Menurut Creswell (2013), wawancara merupakan serangkaian langkah prosedur, namun pada kenyataannya wawancara adalah hal penting yang digunakan untuk memverifikasi validitas, reliabilitas, dan generalisasi temuan atau penelitian sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara mendalam.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan panduan wawancara yang memuat beberapa pertanyaan yang telah disiapkan untuk diajukan kepada informan yang relevan. Wawancara ini dilakukan secara langsung, tatap muka antara pewawancara dan informan, dalam suasana santai agar informasi yang diberikan oleh informan dapat mengalir secara alami. Meskipun demikian, proses wawancara tetap dibatasi oleh fokus penelitian yang telah ditetapkan.

c. Telaah dokumen

Craswell (2014) menyatakan bahwa telaah dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Pengumpulan data pada tahap ini dilakukan dengan beragam dokumen yang dapat memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan.

Untuk keperluan penelitian, peneliti juga dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian baik itu berupa data statistik, maupun dokumen lainnya yang menunjang penelitian untuk membantu analisis. Menurut Creswell (2013), dokumen kualitatif merupakan dokumen publik ataupun dokumen privat. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen, baik berupa dokumentasi pribadi maupun dokumentasi resmi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Untuk sumber sekunder, peneliti mencari informasi dari berbagai penelitian sebelumnya, berita-berita yang tersedia di internet, serta data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2.3.3 Teknik Analisis Data

Creswell (2018:262) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, umumnya prosedur yang diterapkan dimulai dari tahapan yang bersifat umum menuju langkah-langkah yang lebih spesifik. Meskipun analisis yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh strategi yang digunakan, idealnya proses tersebut tetap menggabungkan prosedur umum dengan tahapan khusus. Sementara itu, penelitian kualitatif adalah proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data terkumpul dalam periode tertentu, misalnya melalui wawancara, peneliti kemudian menganalisis jawaban yang diberikan oleh responden. Menurut Creswell (2018), teknik analisis data pada metode penelitian studi kasus (case study) harus dilakukan secara rinci dan detail. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan tahap di mana peneliti menyeleksi dan merangkum data dengan menitikberatkan pada informasi yang paling relevan. Pada proses ini, peneliti memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data. Melalui reduksi, data yang dikumpulkan menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami, sehingga mendukung proses pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil temuan dalam format yang sistematis dan terstruktur. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hasil penelitian. Data yang ditampilkan secara ringkas, terperinci, dan tetap menyeluruh akan memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami berbagai dimensi yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu.

c. *Conclusion drawing/verufication*) Kesimpulan dan Verfikasis

Langkah akhir dalam analisis data kualitatif adalah membuat serta memverifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan temuan-temuan baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi, baik dalam bentuk deskripsi maupun ilustrasi terkait objek penelitian yang dikaji.

2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data berfokus pada sejauh mana data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan keadaan nyata dari objek yang diteliti. Validitas tidak hanya berkaitan dengan kebenaran data, tetapi juga dengan kesesuaian data tersebut terhadap situasi aktual di lapangan. Penilaian validitas ini didasarkan pada ketelitian penelitian dari perspektif peneliti, partisipan, maupun pembaca (Creswell, 2018).

Sementara itu, reliabilitas merujuk pada tingkat konsistensi, keandalan, atau ketepatan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengukuran atau pengumpulan data. Reliabilitas menilai apakah suatu instrumen atau metode pengumpulan data mampu menghasilkan data yang stabil dan konsisten ketika digunakan berulang kali, baik oleh peneliti yang sama maupun berbeda, atau pada waktu yang berlainan. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dianggap reliabel apabila data tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada dan hasilnya tetap konsisten meskipun diuji ulang.